

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laos merupakan negara yang dikelilingi oleh daratan dan sama sekali tidak memiliki akses dengan laut, kasus negara seperti ini biasanya disebut sebagai negara *landlocked*. Kebanyakan dari negara-negara penyandang negara *landlocked* merupakan negara yang berkembang dan mengalami perekonomian yang cukup sulit. Hal ini pula yang terjadi pada Laos sebagai negara berkembang dimana negara ini menjadi satu-satunya negara yang dikelilingi oleh daratan di Asia Tenggara. Dalam hal perekonomian, Laos juga dianggap sebagai negara yang perekonomiannya kurang baik dimana pendapatan nasional brutonya sebesar 1.130 dollar Amerika perkapita dan memiliki tingkat kemiskinan mencapai sebesar 26% (Dayley & Neher, 2013)

Peran pemerintahan negara Laos dalam meningkatkan perekonomian adalah hal yang paling terpenting, dimana pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menolong perkembangan perekonomian Laos. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Laos akan sangat berdampak besar terhadap pemasukan negara Laos itu sendiri dan juga sebagai pengganti peran laut yang tidak dapat dijangkau. Banyak sektor yang dapat dicoba untuk dikembangkan oleh pemerintahan Laos dalam menata perekonomian negara agar

lebih baik lagi. Salah satu sektor yang berpotensi besar dalam membantu perekonomian negara Laos yaitu sektor pariwisata.

Dilihat dari potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Laos terutama peninggalan-peninggalan sejarah serta fauna dan flora yang langka di Laos dapat membantu perkembangan sektor pariwisata di Laos. Jumlah hutan Laos sebagai negara *landlocked* juga merupakan sebuah ladang penghasilan yang luar biasa jika benar-benar dimanfaatkan secara bijak dan juga dikelola secara baik, maka Laos bisa mendapatkan peningkatan dalam pemasukan perekonomian. Sejak tahun 1993 telah adanya rencana pengembangan sektor pariwisata yang dimulai oleh kepemimpinan Nouhak Phoumsavanh. Nouhak sebagai Presiden kala itu telah merencanakan suatu kebijakan dimana Laos akan menjadikan 21% daratan Laos sebagai konservasi keanekaragaman hayati yang kemungkinan akan menjadi taman nasional yang paling terbesar di Asia Tenggara (Stuart-Fox, 1997). Dengan adanya potensi-potensi alam yang dipandang baik maka potensi itu pula harus dikelola secara perlahan tetapi juga pasti oleh pemerintah negara Laos serta pengelolaan yang terus-menerus akan memberikan dampak positif bagi pendapatan negara Laos.

Kebijakan di sektor pariwisata terus berlanjut pada era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone. Pada era Khamtai sampai dengan Choummaly baru dikembangkan sektor pariwisata secara nyata dengan mengembangkan tempat-tempat wisata yang akan menjadi objek nasional Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata serta adanya peran sektor pariwisata yang memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Laos melalui kebijakan berupa

plan dan strategi-strategi lainnya (Harrison & Schipani, 2009). Perkembangan ini berbeda jauh dengan kebijakan yang dikeluarkan sebelum era Khamtai yang hanya melakukan pengontrolan terhadap perusahaan wisata serta rencana pengembangan alam yang bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata untuk berkembang.

Dalam *plan* dan strategi yang dikembangkan pihak pemerintah juga melakukan kerjasama. Laos melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Thailand, Kamboja dan Myanmar dalam meningkatkan kapasitas dari sungai Mekong sebagai tempat wisata yang dapat mendatangkan *tourist* (Kerr & Revill, 2003) sehingga sungai Mekong bukan hanya sarana yang digunakan untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangganya tetapi juga efektif sebagai tempat pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan adanya pula promosi tentang *ecotourism* yang dilakukan oleh pemerintahan Laos membuat adanya peningkatan *tourist* dari tahun 1995 yang hanya sebanyak 346.460 ribu orang menjadi 1 juta orang pada tahun 2005, bukan hanya peningkatan *tourist* tetapi sektor ini juga menyumbangkan lapangan pekerjaan untuk 18.000 masyarakat Laos (Butler & Hinch, 2007).

Perkembangan pada sektor pariwisata yang semakin pesat dapat dilihat sampai kepemimpinan baru Laos sekarang ini. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berbeda dari kepemimpinan Khamtai Siphandon sampai pada era kepemimpinan Choummaly Sayasone telah menolong perekonomian Laos yang selama ini bisa dikatakan kurang baik. Sektor pariwisata merupakan penyumbang investasi luar negeri ketiga di Laos sebesar 8.76% setelah *Electric Power* sebesar

65,13% dan *Transport* sebesar 9,22% pada tahun 1998 tepat setelah 10 tahun dibukanya kebijakan pariwisata di Laos (Sayo Yamauchi, 1999). Sektor pariwisata juga berkontribusi dalam menyumbang pendapatan nasional sebanyak 7 sampai 9 persen pada tahun 2003 (Harrison & Schipani, 2009).

Sektor pariwisata Laos semakin berkembang ditandai dengan adanya peningkatan wisatawan yang mencapai 18% dimulai dari tahun 1994 sampai dengan 2014, dibuktikan dengan adanya peningkatan angka wisatawan sebanyak 737.208 orang pada tahun 2000 yang kemudian semakin meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak 4.158.000 orang. Bukan hanya sekedar itu saja, sektor pariwisata menjadi devisa terbesar kedua di Laos dengan menyumbang pemasukan negara sebesar 641 juta US dollar pada tahun 2014 (Majalah Asean, 2016). Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang bisa berperan sangat besar dan kemungkinan bisa menjadi prioritas utama bagi negara Laos dalam membantu memperbaiki kondisi perekonomian Laos, sehingga meskipun tidak adanya akses dengan laut yang merupakan sumber pemasukan perekonomian di sejumlah negara-negara di dunia ini, Laos tetap dapat bersaing dalam hal meningkatkan perekonomian negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis perkembangan kebijakan pemerintah Laos pada sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian era Khamtai Siphandon-Choummaly Sayasone melalui perspektif teori *developmental state* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan kebijakan yang dilakukan pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata di era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone.
2. Untuk mengetahui kerjasama eksternal yang dijalin oleh negara Laos dengan negara dan non-negara di sektor pariwisata.
3. Untuk melihat pertumbuhan perekonomian Laos yang dihasilkan dari sektor pariwisata di era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone.

1.4 Signifikasi

Penelitian ini penting dilakukan karena Laos sebagai negara *landlocked* yang memiliki perekonomian yang kurang baik membuat pemerintah Laos harus berupaya dalam meningkatkannya di berbagai macam sektor, salah satunya yaitu sektor pariwisata. Adanya sumber-sumber budaya maupun tempat-tempat destinasi wisata yang terdapat di Laos dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Pengembangan sektor pariwisata yang baik akan berujung kepada pemasukan negara, tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Laos. Hal ini kemudian perlu dianalisis lebih dalam, karena sebelumnya belum ada penelitian yang membahas kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata di Laos secara terperinci untuk meningkatkan perekonomian Laos, sehingga penulis akan membahas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisatanya, dimana kebijakan

tersebut akan berupa *plan* dan strategi yang diambil oleh pemerintah Laos dan kerjasama eksternal yang dilakukan.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian ekonomi di Laos, dimana dalam tulisan ini akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah Laos khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata pada era Khamtai Siphandon pada tahun 1998 sampai era Choummaly Sayasone yang kepemimpinannya berakhir di tahun 2016. Selain itu tulisan ini juga akan mencakup pembahasan terkait sektor pariwisata, *private sector*, hubungan kerjasama eksternal antara Laos dengan negara lain serta aktor non-negara. Dalam kasus pengembangan sektor pariwisata di Laos, akan ada analisis mengenai strategi pemerintahan Laos, kerjasama antara Laos dengan mitra kerjasamanya, serta dampak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata terhadap perekonomian Laos.

1.6 Kajian Pustaka

Tulisan yang berjudul '*Tourism in The Lao People's Democratic Republic*' yang ditulis oleh David Harrison dan Steven Schipani dalam buku *Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions* secara garis besar membahas tentang sektor pariwisata sebagai salah satu alat yang digunakan untuk perkembangan sosial maupun perekonomian di Laos. David dan Steven juga menjelaskan peran dari sektor pariwisata serta potensial pariwisata yang dimiliki oleh Laos yang dapat digunakan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Dalam

sub bab buku ini juga, penulis membahas tentang organisasi-organisasi khusus yang dibentuk untuk menjalankan sektor pariwisata yang ada di Laos untuk menunjang keberlangsungan sektor pariwisata (Harrison & Schipani, 2009).

Tulisan yang berjudul '*Economic Corridors and Ecotourism: Whither Tourism in Laos?*' yang ditulis oleh Robert Travers dalam buku *Asian Tourism: Growth and Change* secara garis besar memiliki isi pembahasan yang hampir sama seperti tulisan sebelumnya yaitu membahas peran dari sektor pariwisata yang dapat menunjang perekonomian negara Laos. Dalam tulisan ini juga dijelaskan bagaimana perkembangan sektor pariwisata yang berkembang dengan baik serta alasan-alasan apa saja yang membuat sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik. Robert juga menuliskan rancangan atau rencana serta bagaimana mengontrol sektor pariwisata tersebut (Travers, 2008).

Tulisan yang berjudul '*Tourism development in the Lao People's Democratic Republic*' yang ditulis oleh Sayo Ymuachi dan Donald Lee ini membahas tentang industri pariwisata yang dapat berkembang dengan baik di Laos yang membuat pemasukan negara menjadi bertambah. Penulis juga menjelaskan bahwa kondisi alam yang masih sangat baik serta masyarakat yang masih banyak yang menjaga budayanya yang ada di Laos menjadi daya tarik sendiri bagi pemerintah Laos dalam menjalankan sektor pariwisata tersebut. Dalam tulisan ini penulis juga membahas tentang bagaimana pemerintah Laos mengambil langkah untuk membuat kebijakan dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai macam organisasi

internasional maupun *non-governmental organization* yang bertujuan untuk mempromosikan kelangsungan sektor pariwisata (Sayo Yamauchi, 1999).

Buku lainnya yang membahas tentang potensial sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Laos yaitu tulisan yang berjudul '*Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016: Enhancing Regional Ties*' yang di keluarkan oleh OECD, dimana dalam buku ini dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan mempromosikan sektor pariwisata yang memiliki potensi yang besar maka dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Laos. Dalam buku ini pula dijelaskan bahwa sektor pariwisata di Laos mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Hal tersebut dikarenakan terus bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Laos (OECD, 2016).

Jurnal yang berjudul '*The Impact of Tourism Policies Toward The Tourists Arrival in ASEAN: A Case Study Of Laos PDR*' yang ditulis oleh Krish Rugchatjaroen ini membahas tentang bagaimana pengaruh dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Laos dalam mengembangkan serta menjalankan sektor pariwisata yang ada di Laos. Dalam jurnal ini juga dijelaskan secara terperinci tentang program *advertisement* dan cara mempromosikan pariwisata. Program-program yang bermanfaat dalam meningkatkan wisatawan yang dibagi menjadi 6 program yaitu *Produce printing and advertising materials, implement and extension of tourism information centers, Advertise Laos tourism through media and tourism trade fair, Participation in international tourism exhibitions, Promotion of tourism activities, dan Cooperation with domestic and foreign*

business sectors in the advertisement and movement towards marketing. Program-program yang dijalankan dengan baik maka akan mempengaruhi kedatangan wisatawan asing yang akan memberikan tambahan bagi perekonomian negara Laos (Rugchatjaroen, 2017).

Dari beberapa kajian pustaka diatas sebagai referensi yang akan membantu penulis dalam menganalisis kebijakan pemerintah Laos terhadap sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian di Laos yang lebih terperinci khususnya di era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone, sehingga tulisan yang akan dibuat oleh penulis ini akan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya yang telah dibuat. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan-tulisan lain yaitu letak penjelasan terhadap analisis perkembangan kebijakan yang berbeda-beda yang terus dijalankan dari era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone pada sektor pariwisata Laos. Perbedaan lainnya yaitu beberapa tulisan di kajian pustaka ini hanya mendeskripsikan faktor mengapa sektor pariwisata dapat membantu perekonomian Laos apabila sumber daya alam yang ada di Laos dimanfaatkan. Letak perbedaan juga terletak di beberapa buku yang sama-sama hanya menjelaskan secara terperinci salah satu bentuk dari fokus kebijakan yang dibuat di tahun-tahun tertentu contohnya seperti *pro-poor tourism* ataupun *community base tourism*. Dalam penjelasan di beberapa buku yang ada di kajian pustaka juga tidak secara luas menjelaskan tentang kerjasama-kerjasama yang dilakukan pemerintah Laos dalam mengoptimalkan kebijakan yang telah dibuat khususnya di sektor pariwisata.

1.7 Landasan Teori

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan teori *developmental state* dalam menganalisis peran kebijakan pemeritahan Laos pada sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Teori *developmental state* menurut Adrian Leftwich adalah teori yang membahas tentang pembangunan negara dimana adanya sebuah campur tangan oleh pemerintah secara penuh terhadap pihak non-pemerintah untuk melakukan pembangunan di negaranya, khususnya di bidang perekonomian (Leftwich, 1995). Adanya campur tangan pemerintahan dalam pembangunan perekonomian negara dengan ikut membantu pihak perusahaan non-pemerintah dalam menjalankan pasar agar perkembangannya dapat berjalan lebih cepat sehingga perkembangan ekonomi lebih mudah dicapai.

Menurut Adrian Leftwich adanya 4 indikator dalam teori *developmental state* yang dilihat dari keberhasilan negara-negara Asia Timur yaitu Jepang dan Taiwan, indikator tersebut yaitu (Leftwich, 1995):

1. Adanya kedekatan pemerintah terhadap *private sector*

Ciri penting dari mengembangkan negara adalah adanya hubungan yang erat yang terjalin antara negara dengan *private sector* dan intensitas keterlibatan *private sector* tersebut di pasar.

2. Adanya *key Ministries*

Fitur selanjutnya yang menunjang perkembangan negara dapat dilihat dari kekuatan dan otonomi birokrasi dari elitnya, dimana adanya badan pemerintah yang mengontrol sektor yang akan dikembangkan dalam negara tersebut.

3. Adanya *policy goals*

Mengembangkan negara tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam setiap pembuatan kebijakan yang dikeluarkan dan telah disepakati oleh elit birokrasi dimana tujuan dari kebijakan tersebut menjadi kepentingan utama yang harus dicapai oleh pemerintah.

4. Adanya tujuan untuk melindungi dan mempromosikan objek-objek nasional

Objek-objek nasional sebagai sumber daya yang harus dilindungi oleh pemerintah merupakan suatu kewajiban dan mempromosikan objek tersebut agar dapat diperkenalkan kepada dunia luar dan menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian negara.

Dalam teori *developmental state* negara memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan di dalam pembangunan, dimana peran dan posisi seperti ini terjadi karena setiap negara memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan, mampu untuk menjalankan dan mengatur setiap pihak-pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan pertumbuhan di setiap sektor terutama di sektor perekonomian (Marijan, 2005). Menurut Andrian Leftwich peran dan posisi negara sangat menentukan berdasarkan dari batasan *developmental state* yang digambarkan sebagai negara-negara yang memiliki kekuasaan politik yang terkonsentrasi secara cukup, otonomi dan kapasitas untuk membentuk, mencapai, dan mendorong tercapainya tujuan-tujuan eksplisit dari pembangunan, dimana hal itu dicapai melalui pembentukan dan promosi keadaan-keadaan dan arah pertumbuhan perekonomian, melalui pengorganisasian pertumbuhan ekonomi itu secara langsung, atau melalui berbagai kombinasi (Leftwich, 1995).

Hal ini menjelaskan bagaimana Laos sebagai negara dapat menjalankan peran serta posisinya dengan baik, dimana pemerintah Laos dapat membentuk, mencapai, dan mendorong tercapainya perkembangan ekonomi di sektor pariwisata dengan adanya pembentukan *Lao National Tourism Administration* (LNTA) yang sebelumnya merupakan *National Authority of Lao PDR* yang dinaungi oleh kementrian Laos dimana tugasnya adalah untuk membantu serta mengawasi perusahaan-perusahaan non-pemerintah yang ada di beberapa provinsi di Laos agar sektor pariwisata dapat terus berjalan dengan baik. Pemerintah Laos ikut serta dalam memperluas jaringan bantuan agar usaha-usaha kecil serta *project-project* yang dilakukan oleh disetiap provinsi, salah satu contohnya seperti *Lao Nam Ha Ecotourism Project* yang dilakukan di provinsi Luang Namthan terus dapat berjalan. Adanya bantuan-bantuan bantuan dana dimulai dari tahun 1999 seperti *New Zealand Agency for Internasional Development*, *The Japanese Goverment trough the International Finance Corporation's Trust Funds Programme*, UNESCO dan perusahaan-perusahaan lainnya (David Harrison, 2009). Peran pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata juga terbukti berhasil dengan adanya perkembangan pesat pada pembangunan akomodasi yang dilakukan oleh pihak *private sector* yang tetunya dibawah dari naungan pemerintah Laos dimana jumlah pembangunan akomodasi di tahun 1998 hanya sebanyak 307 menjadi sebanyak 1701 pada tahun 2009 (Lao National Tourism Administration , 2009).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori *developmental state* tepat digunakan dalam penelitian ini, dimana adanya peran dan posisi penting negara Laos dalam melakukan pembangunan perekonomian dalam negaranya. Peran

tersebut salah satunya adalah berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk membantu pertumbuhan perekonomian negaranya. Teori *developmental state* juga sebuah teori yang tepat digunakan untuk menganalisis terkait pengaruh kebijakan pemerintah Laos pada sektor pariwisatanya untuk meningkatkan perekonomian negara, dimana adanya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Laos dengan cara mempromosikan keadaan-keadaan yang ada di Laos akan berdampak kepada pengembangan pembangunan negaranya.

Dalam kebijakan pemeritahan Laos untuk meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata tentunya membutuhkan *partner* kerjasama eksternal dimana hal ini akan menghasilkan hubungan yang ketergantungan antara Laos dan juga *partner* kerjasamanya, dimana Laos membutuhkan pihak *private sector* dan aktor lainnya untuk pengembangan sektor pariwisatanya. Dari hubungan pemerintah Laos dengan aktor-aktor lainnya maka akan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan untuk melakukan pembangunan perekonomian negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang didasari pada penafsiran terhadap dunia berdasarkan pada konsep-konsep yang umumnya bersifat interpretatif dimana informasi yang didapatkan biasanya berupa kata-kata atau teks (Stokes, 2006). Metode kualitatif juga disebut sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dimana untuk mengerti gejala

tersebut penelitian harus melakukan wawancara atau survei data-data yang bersifat umum dan luas (Raco, 2010).

Metode ini dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data-data maupun informasi tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Laos dari era Khamtai Siphandon sampai pada era Choummaly Sayasone khususnya di sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian Laos.

1.8.2 Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi data-data berupa dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen bisa berupa tulisan, makalah, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009). Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu semua tulisan maupun makalah yang berisi data-data maupun informasi yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Laos dari era Khamtai Siphandon sampai pada era Choummaly Sayasone khususnya di sektor pariwisata agar memajukan perekonomian Laos yang merupakan satu-satunya negara yang menyandang negara *landlocked* di Asia Tenggara.

1.8.3 Metode Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008). Dalam menganalisa data penulis akan menyusunnya dengan melakukan beberapa komponen yaitu:

1. Reduksi Data

Data-data yang didapatkan dari makalah ataupun dokumen lama jumlahnya akan sangat banyak, maka dari itu penulis harus mencatat secara terperinci dan teliti. Mereduksi berarti hanya merangkum bagian-bagian yang terpenting serta hal-hal pokok dari makalah maupun dokumen lama tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisanya.

3. Penyimpulan Data atau Verifikasi

Kesimpulan akan masih bersifat sementara dan akan terus berubah apabila ditemukannya bukti-bukti maupun data-data baru yang kuat serta mendukung. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali dilakukan dengan cara mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.